

TESIS

**PRINSIP KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA PADA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 23/PUU-XIX 2021
TERKAIT *JUDICIAL REVIEW* PASAL 235 AYAT (1), 293
AYAT (1), 295 AYAT (1) UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG**



OLEH

RINDRA MUTFIANTO

20310013

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2022

TESIS

**PRINSIP KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA PADA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 23/PUU-XIX 2021 TERKAIT
JUDICIAL REVIEW PASAL 235 AYAT (1), 293 AYAT (1), 295 AYAT (1)
UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN UTANG**

Diajukan oleh :

RINDRA MUTFIANTO

NPM : 20310013

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
UNTUK DIUJI TANGGAL 14 JULI 2022**

Oleh

Pembimbing I



Dr. Endang Retnowati, S.H, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.Hum.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

TESIS

**PRINSIP KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA PADA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 23/PUU-XIX 2021 TERKAIT
JUDICIAL REVIEW PASAL 235 AYAT (1), 293 AYAT (1), 295 AYAT (1)
UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN UTANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

RINDRA MUTFIANTO

NPM : 20310013

Telah dipertahankan di depan
Dewan Penguji Pada Tanggal 28 Juli 2022

Susunan Dewan Penguji

Dr. Fani Martiawan, S.H., M.H.	Ketua
Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.	Anggota
Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum.	Anggota
Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum.	Anggota



Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Tanggal 28 Juli 2022

Ketua Program Studi Magister Hukum


Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **RINDRA MUTFIANTO**
NPM : 20310013
Alamat : Jl. Bandar Gg. 8 No. 20 Kel. Sepanjang - Sidoarjo
No. Telp (HP) : 082333846011

Menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul **“Prinsip Keadilan Berdasarkan Pancasila Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX 2021 Terkait *Judicial Review* Pasal 235 Ayat (1), 293 Ayat (1), 295 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 14 Juli 2022

Yang Menyatakan



RINDRA MUTFIANTO

NPM. 20310013

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga penulis dapat untuk menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul **PRINSIP Keadilan Berdasarkan Pancasila pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX 2021 terkait *Judicial Review* Pasal 235 Ayat (1), 293 Ayat (1), 295 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang**. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga, memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
3. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Dr. Endang Retnowati, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dengan sabar.

5. Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan tesis ini.
6. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.
7. Teristimewa untuk Ayahanda Tumiran dan Ibunda Mutrofah tercinta serta adik-adikku yang telah memberikan doa dan motivasi, Sehingga penulis dapat Menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
8. Istriku tercinta Ricca Okita Kastria Wijayanti dan anakku tersayang Rafasya Alfarezel Mutfianto yang telah memberikan dorongan semangat hingga selesainya penyusunan tesis ini.
9. Rekan-rekan kantor Hukum Gasman Gazali & Associates yang memberikan semangat untuk segera lulus.

Akhir kata, Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Hukum di sekolah maupun di Perguruan Tinggi serta bermanfaat bagi para pembaca. Amin yaa rabbal alamin.

Surabaya, 14 Juli 2022



RINDRA MUTFIANTO

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1. Permasalahan dan Rumusan Masalah	1
2. Tujuan Penelitian	11
3. Manfaat Penelitian	11
a. Manfaat Teoritis	10
b. Manfaat Praktis	10
4. Metode Penelitian	12
a. Metode Pendekatan	12
b. Bahan Hukum	12
c. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	13
d. Analisa Bahan Hukum	13
5. Kajian Teoritis	14
a. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	14
b. Tinjauan Umum Asas Keadilan	18
6. Pertanggungjawaban Sistematis	34
BAB II ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 23/PUU/XIX/2021	
1. Para Pihak	36

2.	Posisi Kasus	37
3.	Kajian Risalah Pembahasan Pasal-pasal A Quo UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	53
4.	Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi	57
5.	Konklusi	80
6.	Amar Putusan	81
7.	Analisis	81
BAB III MEKANISME PENUNDAAN KEWAJIBAN ASAS KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 23/PUU/-XIX/2021		
1.	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	84
2.	Perdamaian Dalam Hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	97
3.	Macam-macam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	103
4.	Pancasila sebagai Ideologi	106
5.	Karakteristik Keadilan Berdasarkan Pancasila	113
6.	Asas Keadilan Hukum Berdasarkan Pancasila Dalam Putusan. Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU/-XIX/2021	124
BAB IV PENUTUP		
1.	Kesimpulan	138
2.	Saran	139
DAFTAR BACAAN		141

ABSTRAK

Kepailitan membawa dampak yang sangat besar dan penting terhadap pertumbuhan perekonomian suatu Negara serta dapat mengancam kerugian bagi perekonomian suatu Negara. Karena perusahaan menghadapi ancaman kesulitan untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya. Untuk menghindari terjadinya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka diperlukan suatu upaya hukum yang dapat menyeimbangi keberadaan dan fungsi kepailitan itu sendiri, Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hadir untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil dan berimbang kepada para pemangku kepentingan (*stake holders*) dalam hal ini kreditor, debitor dan masyarakat. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 belum memberikan perlindungan yang seimbang kepada para pemangku kepentingan yaitu kreditor, debitor dan masyarakat. Dalam Permohonan *Judicial Review* No. 23/PUU-XIX/2021 yang di ajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada terkait Permohonan pengujian Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004, PT. Sarana Yeoman Sembada mendalilkan bahwa Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) tidak mencerminkan asas Keadilan dan bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka, mempunyai peranan penting untuk menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum, Kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menguji Undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tertinggi konstitusi dalam memberikan putusan harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Keadilan berdasarkan Pancasila harus diwujudkan, dijabarkan dan direalisasikan ke dalam norma hukum, sehingga dalam memberikan putusan Mahkamah Konstitusi harus berlandaskan Pancasila. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut (1) Bagaimanakah Posisi Kasus Permohonan *Judicial Review* No. 23/PUU-XIX/2021? (2) Bagaimanakah mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? (3) Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 23/PUU/-XIX/2021 telah mencerminkan prinsip Keadilan Pancasila?. Penelitian ini menggunakan metode yang digunakan adalah Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan cara melakukan telah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kajian pokoknya ialah *ratio decidendi* atau *reasoning* (pertimbangan hakim untuk sampai kepada suatu putusan).

Kata Kunci : PKPU, Mahkamah Konstitusi, Keadilan berdasarkan Pancasila

ABSTRACT

Bankruptcy has a very large and important impact on the economic growth of a country and can threaten losses to the economy of a country. Because the company faces the threat of difficulty in paying its debts to its creditors. To avoid the occurrence of a bankruptcy decision by the Commercial Court, a legal remedy is needed that can balance the existence and function of the bankruptcy itself, Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations exists to provide protection and fair and balanced treatment to stakeholders (stakeholders), in this case creditors, debtors and the public. Law No. 37 of 2004 has not provided balanced protection to stakeholders, namely creditors, debtors and the public. In the Application for Judicial Review No. 23/PUU-XIX/2021 submitted by PT. Sarana Yeoman Sembada related to the application for review of Article 235 paragraph (1), Article 293 paragraph (1) and Article 295 paragraph (1) of Law no. 37 of 2004, PT. Sarana Yeoman Sembada postulates that Article 235 paragraph (1), Article 293 paragraph (1) and Article 295 paragraph (1) do not reflect the principle of Justice and contradict Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court as one of the independent judicial powers, has an important role to uphold the constitution and the principle of the rule of law, the authority of the Constitutional Court is to examine laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court as the highest interpreter of the constitution in giving decisions must realize social justice for all Indonesian people, Justice based on Pancasila must be realized, elaborated and realized into legal norms, so that in giving decisions the Constitutional Court must be based on Pancasila. Based on the above background, the formulation of the problem as follows: (1) What is the Position of the Case for the Application for Judicial Review No. 23/PUU-XIX/2021? (2) What is the mechanism for the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) in Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations? (3) Is the Constitutional Court Decision Number. 23/PUU/-XIX/2021 has reflected the principle of Pancasila Justice?. This study uses the method used is a case approach, namely by carrying out cases related to the issues at hand that have become court decisions that have permanent power. The main study is the ratio decidendi or reasoning (the judge's consideration to arrive at a decision).

Keywords: PKPU, constitutional court, Justice based on Pancasila